

BAB III

EVALUASI PROGRAM SEKOLAH SIAGA BENCANA (SSB) SEBAGAI LANGKAH MITIGASI BENCANA DI KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus: SD Negeri Bangunrejo 1 dan SD Negeri Baluwarti)

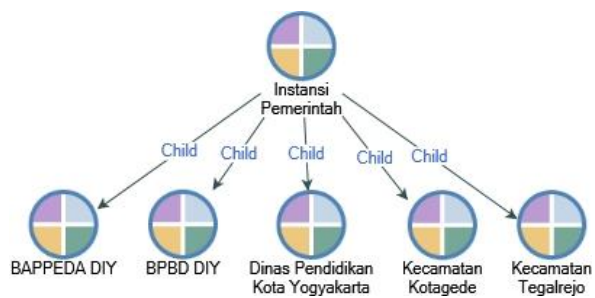
Evaluasi merupakan sebuah metode berupa penyajian informasi untuk mengukur perbandingan pencapaian suatu program dari target yang telah ditentukan, perbedaan pencapaian dengan standar yang telah dibuat, serta manfaat yang muncul dengan harapan yang di inginkan sebelumnya (Amirono & Daryanto, 2016). Evaluasi menjadi bagian penting dari pelaksanaan suatu program, karena hasil evaluasi nantinya akan digunakan sebagai penilaian terhadap program untuk dapat mengetahui apakah program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, evaluasi juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan terkait dilanjutkan atau diberhentikan program tersebut.

Program Sekolah Siaga Bencana (SSB) merupakan program yang bertujuan agar sekolah memiliki kemampuan untuk mengelola risiko bencana di lingkungannya diukur dengan adanya perencanaan penanggulangan bencana (sebelum, saat dan sesudah bencana), ketersediaan logistik, keamanan dan kenyamanan di lingkungan pendidikan, infrastruktur, serta sistem kedaruratan yang didukung oleh pengetahuan dan kemampuan kesiapsiagaan, prosedur tetap (*standard operational procedure*), dan sistem peringatan dini (KPBI, 2011). Program Sekolah Siaga Bencana (SSB) akan sangat bermanfaat sebagai salah satu langkah mitigasi bencana terutama bagi anak-anak yang termasuk rentan menjadi

korban bencana. Untuk mendapatkan data-data terkait pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di Kota Yogyakarta, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber seperti gambar di bawah ini;

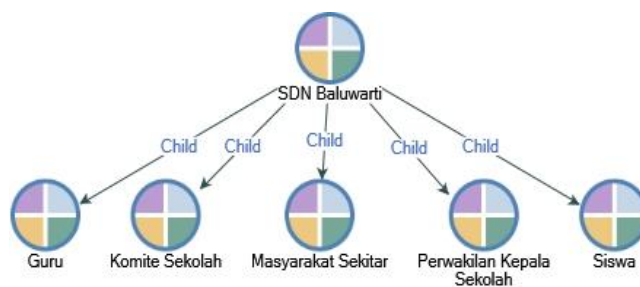
Gambar 3.1

Instansi Pemerintah



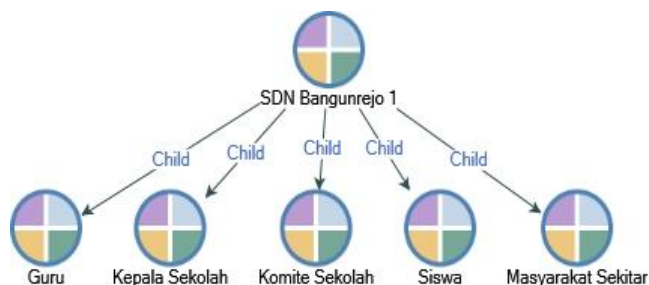
Gambar 3.2

SD Negeri Baluwarti



Gambar 3.3

SD Negeri Bangunrejo 1



(Sumber: diolah dengan Nvivo 12 plus, 20 November 2019)

Evaluasi program Sekolah Siaga Bencana (SSB) dalam penelitian ini menggunakan metode *CIPP Model* yang meliputi 4 (empat) tahapan yaitu tahap

Context (konteks), *Input* (Masukan), *Process* (proses), dan *Product* (hasil). Sehingga akan di lihat apakah pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) sudah berjalan dengan baik atau belum, serta mengetahui bagaimana kondisi ataupun sumber daya yang mendukung adanya program tersebut. Selain itu, juga dapat melihat bagaimana hasil dari program Sekolah Siaga Bencana (SSB) apakah nantinya ada penambahan ataupun berkurang, dan yang terakhir guna mengetahui dampak yang ditimbulkan dari program Sekolah Siaga Bencana (SSB). Berikut adalah penjelasan dan pembahasan dari 4 (empat) indikator di atas;

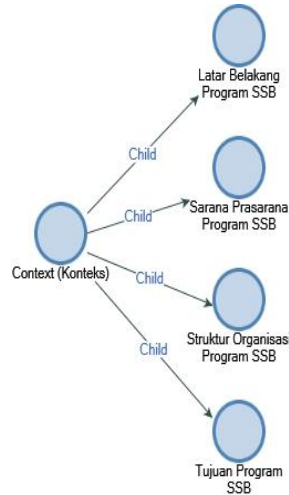
3.1 Indikator *Context* (Konteks)

Dalam indikator *Context* (konteks) terkait pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 akan di bahas apa saja yang digunakan untuk membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan, dan merumuskan tujuan program SSB yang dibagi menjadi 4 (empat) bagian pemaparan sekaligus pembahasan.

Pertama, yaitu latar belakang program untuk mengetahui bagaimana awal mula adanya program SSB. *Kedua*, sarana prasarana program untuk mengetahui apa saja sarana prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program SSB. *Ketiga*, struktur organisasi program untuk mengetahui keterlibat warga lingkungan sekolah dalam pelaksanaan program SSB. *Keempat*, tujuan program SSB seperti gambar 3.4 berikut;

Gambar 3.4

Indikator *Context* (konteks)



(Sumber: diolah dengan Nvivo 12 plus, 20 November 2019)

3.1.1 Hasil Data Lapangan Indikator *Context* (Konteks)

Berdasarkan kegiatan wawancara lapangan dengan BPBD DIY, kepala sekolah dan guru selaku fasilitator kegiatan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 serta melalui dokumentasi data sekunder yang ada, maka dapat terkumpul data-data hasil wawancara sehingga dapat disajikan dalam tabel perbandingan seperti berikut;

Tabel 3.1

Perbandingan Data *Context* Hasil Wawancara dan Dokumentasi

No	Sumber Data	Indikator <i>Context</i> (Konteks)			
		Latar Belakang Program SSB	Sarana Prasarana Program SSB	Struktur Organisasi Program SSB	Tujuan Program SSB
1.	Instansi Pemerintahan	ada	ada	tidak ada	ada
2.	SD Negeri Baluwarti	ada	ada	ada	ada
3.	SD Negeri Bangunrejo 1	ada	ada	tidak ada	ada

(Sumber: diolah peneliti, 17 Desember 2019)

Berikut adalah penjelasan dari perbandingan data *context* (konteks) hasil wawancara dan dokumentasi dari ketiga sumber data di atas, yaitu;

3.1.1.1 Instansi Pemerintah

Program Sekolah Siaga Bencana (SSB) merupakan program lanjutan dari Sekolah Darurat sebelum BPBD dibentuk yang didasari pada kepedulian terhadap kondisi sekolah-sekolah yang hancur akibat dampak bencana. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD DIY Mahujud.S melalui wawancara pada 30 Oktober 2019 yang mengatakan bahwa;

“Dulu istilah Sekolah Siaga Bencana (SSB) berasal dari PMI sebelum BPBD dibentuk. Untuk menghadapi dampak dari bencana dulu solusinya adalah mendirikan sekolah darurat sesuai amanah dari Permendikbud No 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dimana pendidikan khusus diadakan jika terjadi sesuatu seperti pada daerah tertinggal, terpencil, daerah konflik, bahkan daerah yang dilanda bencana.”

Oleh karena itu maka pada tahun 2012, BPBD DIY mulai melakukan pembentukan sekolah rintisan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) dimana dulu pertama kalinya dibentuk di SMK Muhammadiyah Cangkringan dan SMP Negeri 2 Cangkringan Kabupaten Sleman. Tujuan dibentuknya program Sekolah Siaga Bencana (SSB) khususnya di DIY yaitu agar setiap sekolah memiliki kapasitas kemampuan yang memadai dalam menghadapi kondisi darurat bencana yang kapan saja bisa terjadi sehingga proses kegiatan belajar mengajar masih tetap berjalan. Alasan lainnya yaitu

pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap anak sehingga jika tidak memberikan penanganan efektif dan khusus akibat dampak bencana, dikhawatirkan akan mengganggu psikologis mereka.

Program Sekolah Siaga Bencana (SSB) dirancang dengan melibatkan banyak pihak yang peduli dengan kondisi pendidikan pasca terjadi bencana dengan digawangi BPBD DIY langsung. Terkait sarana prasarana selama persiapan sampai peresmian program Sekolah Siaga Bencana (SSB) disediakan langsung oleh BPBD DIY yang disesuaikan dengan potensi bencana yang ada di kawasan sekolah tersebut sekaligus dijadikan sebagai stimulan (penyemangat) untuk terus melanjutkan program tersebut secara mandiri setelah diresmikan. Terkait sarana prasarana yang diberikan kepada SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 secara umum seperti rambu-rambu jalur evakuasi, plang titik kumpul, peralatan kesehatan, drakbar, HT, dapur darurat, dan sebagainya. Untuk pembentukan struktur organisasi pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) diserahkan kepada sekolah pelaksana program itu sendiri.

3.1.1.2 SD Negeri Baluwarti

SD Negeri Baluwarti telah memiliki latar belakang tersendiri yang mendasari dalam pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) seperti yang disampaikan oleh Sigit Setyawan melalui wawancara pada 24 Oktober 2019, mengatakan bahwa;

“Penetapan SD Negeri Baluwarti sebagai Sekolah Siaga Bencana (SSB) dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh kejadian gempa bumi tahun 2006 menimpa Kota Yogyakarta mengakibatkan kerusakan parah hampir 80% bangunan sekolah runtuh. Kemudian, BPBD DIY melakukan evaluasi BPBD DIY terkait tingkat resiko bencana alam terutama puting beliung dan gempa bumi di kawasan tersebut.”

Berdasarkan hal tersebut maka tahun 2016 SD Negeri Baluwarti dipilih sebagai salah satu *piloting project* (sekolah percontohan) program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di Kota Yogyakarta. Sementara itu tujuan diselenggarakannya program Sekolah Siaga Bencana di SD Negeri Baluwarti yaitu untuk meminimalkan tingkat resiko bencana alam terutama di daerah SD Negeri Baluwarti yang lebih sering terjadi gempa bumi terutama setelah melihat dampak dari bencana gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006 lalu.

Terpilihnya SD Negeri Baluwarti sebagai salah satu *piloting project* (sekolah percontohan) program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di Kota Yogyakarta membuatnya diberikan fasilitas sarana prasarana penunjang yang memadai dan lengkap dari BPBD DIY, seperti tabel 3.2 berikut;

Tabel 3.2

Sarana Prasarana Pendukung Program SSB SD Negeri Baluwarti

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1.	Tandu	1 buah	1	-
2.	Alat Pemadam Kebakaran (Akpar)	3 buah	3	-
3.	Alat tensi	2 buah	1	1
4.	Kassa	7 buah	7	-
5.	Modul Kebencanaan	350 buku	350	-
6.	Alat pengikat patah tulang	4 buah	4	-
7.	Alat infus	1 buah	1	-
8.	Perban/Medika	8 buah	8	-
9.	Tabung Oksigen	2 buah	2	-
10.	Obat spray penghilang rasa nyeri	1 buah	1	-
11.	Bedak gatal (<i>Herocine</i>)	1 buah	1	-
12.	Sarung tangan medis	1 pack	1	-
13.	Plang "Titik Kumpul"	1 buah	1	-

(Sumber: diolah oleh peneliti, 24 Oktober 2019)

Terkait tim penyusun/pengembang kurikulum Sekolah Siaga Bencana (SSB), SD Negeri Baluwarti sudah mempunyai tim tersebut yang terdiri dari kepala sekolah sebagai ketua pelaksana program, guru, karyawan, dan perwakilan komite sekolah sebagai anggota pelaksana.

3.1.1.3 SD Negeri Bangunrejo 1

Latar belakang yang mendasari SD Negeri Bangunrejo 1 terpilih sebagai salah satu sekolah yang melaksanakan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di Kota Yogyakarta diutarakan oleh Kepala Sekolah

Maria Ninik Murdiastuti melalui wawancara pada 29 Oktober 2019, bahwa;

“Ada dua alasan yang mendukung pembentukan Program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SDN Bangunrejo 1 yaitu anak-anak SDN Bangunrejo 1 sebagian besar rumahnya berada di tepi Sungai Winongo dan SDN Bangunrejo 1 diibaratkan sebagai cadangan bila terjadi bencana di SDN Bangunrejo 2 karena lokasinya yang lebih bersinggungan langsung dengan Sungai Winongo sehingga rawan bencana banjir dan tanah longsor.”

SD Negeri Bangunrejo 1 resmi menjadi Sekolah Siaga Bencana (SSB) sejak tahun 2015 bersamaan dengan peresmian SD Negeri Bangunrejo 2 karena kedua sekolah tersebut lokasinya saling berhadapan. Sementara itu tujuan utama diselenggarakan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Bangunrejo 1 yaitu untuk mempersiapkan warga lingkungan sekolah termasuk para murid, guru, bahkan komite sekolah jika terjadi suatu bencana khususnya banjir dan tanah longsor yang rawan terjadi di kawasan tersebut.

Sementara sarana prasarana dalam penunjang pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Bangunrejo 1 yang diberikan oleh BPBD DIY terbilang cukup memadai, diantaranya seperti tabel 3.3 berikut;

Tabel 3.3
Sarana Prasarana Pendukung Program SSB
SD Negeri Bangunrejo1

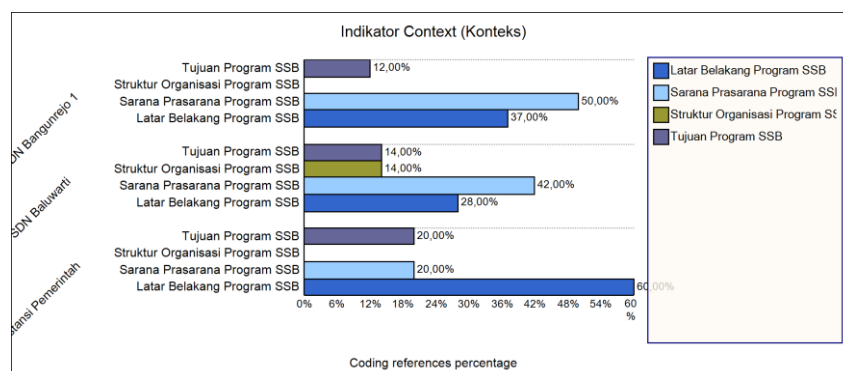
No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1.	Tandu	2 buah	2	-
2.	Alat Pemadam Kebakaran (Akpar)	2 buah	2	-
3.	Tenda Darurat	2 buah	1	1
4.	Dragbar	2 buah	2	-
5.	Modul Bencana Banjir untuk SD/MI	350 buku	350	-
6.	Modul Bencana Kebakaran untuk SD/MI	350 buah	350	-

(Sumber: diolah oleh peneliti, 29 Oktober 2019)

Akan tetapi, karena tidak adanya simulasi ulang setelah peresmian maka beberapa sarana prasarananya disimpan di gudang sekolah. SD Negeri Bangunrejo 1 belum memiliki tim penyusun/pengembang kurikulum Sekolah Siaga Bencana (SSB) karena pelaksanaan program lebih difokuskan pada pembelajaran di kelas.

3.1.2 Evaluasi Indikator *Context* (Konteks)

Gambar 3.5
Hasil Indikator *Context* (Konteks)



(Sumber: diolah dengan Nvivo 12 plus, 20 November 2019)

Evaluasi terhadap *context* (konteks) adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sample yang dilayani dan tujuan proyek (Arikunto, 2004). Sehingga pada indikator *context* (konteks) akan diketahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki program tersebut agar evaluator dapat memberikan arah perbaikan yang diperlukan. Untuk itu dalam melakukan evaluasi *context* pada program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di Kota Yogyakarta dilakukan dengan cara mengetahui bagaimana latar belakang program SSB, tujuan diadakan program, struktur organisasi, dan sarana prasarana dalam pelaksanaan program. Kemudian dianalisis sehingga akan terungkap kebutuhan yang sudah maupun yang belum tercapai.

Latar belakang program Sekolah Siaga Bencana (SSB) akan menunjukkan alasan kenapa sekolah tersebut dipilih sehingga memunculkan tujuan dari diadakan program tersebut. Apabila latar belakang dan tujuan program tidak dimiliki, maka sekolah tersebut tidak dapat dipilih untuk menjalankan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) atau bisa dikatakan sekolah tersebut tergolong aman terhadap resiko bencana. Struktur organisasi akan menunjukkan siapa saja pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di masing-masing sekolah. Apabila sekolah terpilih tidak mempunyai struktur organisasi khusus, maka

dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih wewenang. Sedangkan sarana prasarana akan menjadi fasilitas penunjang untuk menjalankan program Sekolah Siaga Bencana (SSB), sehingga apabila tidak ada maka sekolah tersebut akan kesulitan dalam menjalankan program tersebut tanpa fasilitas mendukung yang memadai.

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa SD Negeri Baluwarti dalam penerapan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di Kota Yogyakarta, sudah memenuhi semua bagian dalam indikator *Context* (Konteks) mulai dari latar belakang program, tujuan program, sarana prasarana, sampai struktur organisasi. Komponen sarana prasarana memiliki poin yang tinggi dibandingkan poin lainnya karena sebagai salah satu sekolah percontohan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di Kota Yogyakarta, SD Negeri Baluwarti diberikan fasilitas yang terbilang lengkap untuk digunakan saat simulasi bahkan untuk penunjang pembelajaran di kelas. Hal ini berarti bahwa secara *Context* (Konteks), SD Negeri Baluwarti sudah siap dalam menjalankan program Sekolah Siaga Bencana (SSB).

SD Negeri Bangunrejo 1 juga sudah memiliki latar belakang, tujuan, dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di kawasan tersebut. Akan tetapi, SD Negeri Bangunrejo 1 belum memiliki struktur organisasi khusus terkait pelaksanaan program SSB. Sehingga terkait koordinasi pelaksanaan program masih di fokuskan pada perintah kepala sekolah.

Bagian sarana prasarana di SD Negeri Bangunrejo 1 terbilang memadai, sehingga pada gambar menunjukkan nilai yang paling besar dibandingkan komponen lainnya.

Sedangkan Instansi pemerintah disini ialah BPBD DIY selaku lembaga yang menangani program Sekolah Siaga Bencana (SSB) lebih fokus pada pembentukan konsep berupa latar belakang program, tujuan program, serta pemberian sarana prasarana pendukung bagi sekolah-sekolah yang ditunjuk untuk menjalankan program tersebut. Untuk struktur organisasi pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB), pembentukannya diserahkan kepada masing-masing sekolah dengan melibatkan kepala sekolah, guru, dan komite sekolah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi pada indikator *context* (konteks) program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di 2 (dua) sekolah dasar SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 bisa dikatakan baik dimana SD Negeri Baluwarti sudah memenuhi 4 (empat) indikator teori evaluasi *context* (konteks) yaitu latar belakang program, tujuan program, sarana prasarana, dan struktur organisasi pengembangan program Sekolah Siaga Bencana (SSB). Akan tetapi, SD Negeri Bangunrejo 1 ada satu yang belum terpenuhi yaitu struktur organisasi pengembangan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) dikarenakan penerapannya lebih difokuskan pada pembelajaran di kelas. Hendaknya pihak sekolah SD Negeri Bangunrejo 1 segera membuat struktur organisasi tersebut agar lebih memudahkan dalam

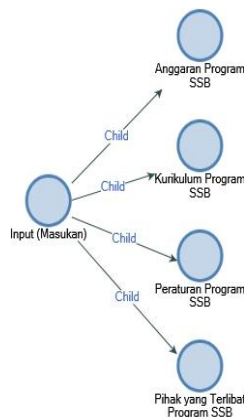
pemberian tanggungjawab terhadap pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) selanjutnya.

3.2 Indikator *Input* (Masukan)

Dalam indikator *Input* (Masukan) pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian pemaparan yaitu anggaran program SSB, kurikulum program SSB, peraturan program SSB, dan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program SSB dari instansi pemerintah, SD Negeri Baluwarti, dan SD Negeri Bangunrejo 1 seperti gambar di bawah ini:

Gambar 3.6

Indikator *Input* (Masukan)



(Sumber: diolah dengan Nvivo 12 plus, 20 November 2019)

3.2.1 Hasil Lapangan Indikator *Input* (Masukan)

Berdasarkan kegiatan wawancara lapangan dengan BPBD DIY, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Bappeda DIY, Kecamatan Tegalrejo dan Kotagede, kepala sekolah serta guru selaku fasilitator kegiatan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 serta melalui dokumentasi data sekunder yang ada, maka dapat

terkumpul data-data hasil wawancara sehingga dapat disajikan dalam tabel perbandingan seperti di bawah ini;

Tabel 3.4

Perbandingan Data *Input* Hasil Wawancara dan Dokumentasi

No	Sumber Data	Indikator <i>Input</i> (Masukan)			
		Anggaran Program SSB	Kurikulum Program SSB	Peraturan Program SSB	Pihak yang Terlibat Program SSB
1.	Instansi Pemerintahan	ada	tidak ada	ada	ada
2.	SD Negeri Baluwarti	ada	ada	tidak ada	ada
3.	SD Negeri Bangunrejo 1	ada	tidak ada	tidak ada	ada

(Sumber: diolah peneliti, 17 Desember 2019)

Berikut adalah penjelasan dari perbandingan data konteks hasil wawancara dan dokumentasi dari ketiga sumber data di atas, yaitu;

3.2.1.1 Instansi Pemerintah

Program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di DIY semua di biayai oleh BPBD DIY termasuk di SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1. Akan tetapi, anggaran yang diberikan dalam bentuk sarana prasarana mulai dari tahap persiapan sampai peresmian. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD DIY Mahujud.S melalui wawancara pada 30 Oktober 2019, mengatakan bahwa;

“Rangkain proses pembentukan Sekolah Siaga Bencana selama 2 tahun, semua biaya dari BPBD DIY mulai dari transportasi, sarana prasarana, sampai konsumsi dimana

anggaran merekat dalam program guna pembangunan kapasitas.”

Sedangkan untuk kurikulum pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di DIY sudah diberikan pelatihan Bimbingan Teknis Penyusunan Kurikulum oleh BPBD DIY kepada guru-guru yang sekolahnya menerapkan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) termasuk pembuatan modul mengajar dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Dikpora Kota Yogyakarta. BPBD DIY dalam melaksanakan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) memiliki landasan hukum tersendiri salah satunya yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana dimana dalam pasal 21 ayat (1) sampai (3) mewajibkan satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan kebencanaan.

Ada banyak pihak yang terlibat dalam persiapan sampai peresmian program Sekolah Siaga Bencana (SSB) khususnya untuk SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 diantaranya Dinas Dikpora Kota Yogyakarta, TNI, Polisi, LSM, *NGO*, puskesmas, PMI, Dinas Kesehatan. Penyusun Renkon berkerjasama dengan pihak ketiga seperti *NGO* dan LSM yang memang selama ini konsen terhadap kebencanaan karena akan terus dibimbing. Penyusunan kurikulum berkerjasama dengan Dinas Dikpora guna melatih guru-guru termasuk dalam pembuatan modul mengajar. Ada juga Pelatihan PPGD (Pelatihan Pertama Pertolongan Gawat Darurat) yang bekerjasama

dengan Palang Merah Indonesia (PMI), Puskesmas, dan Dinas Kesehatan yang menyangkut latihan kemampuan untuk mengatasi kondisi darurat. Sedangkan untuk pihak kecamatan hanya dilibatkan saat peresmian.

3.2.1.2 SD Negeri Baluwarti

Program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Baluwati mulai dari persiapan sampai dengan peresmian (*lauching*) di biayai oleh BPBD DIY sesuai dengan yang disampaikan oleh Sigit Setyawan melalui wawancara yaitu;

“Anggaran persiapan sampai peresmian program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SDN Baluwarti dari BPBD DIY mulai dari konsumsi sampai sarana prasarana, sehingga pihak sekolah hanya tinggal menerima.”

Setelah peresmian, pelaksanaan Program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Baluwati dilakukan mandiri menggunakan dana BOS. Selain itu, SD Negeri Baluwarti juga sudah mempunyai kurikulum mengenai Program Sekolah Siaga Bencana (SSB) yang sudah diintegrasikan dalam bentuk simulasi, sosialisasi, dan sebagainya.

Ketika peresmian (*lauching*) program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Baluwarti melibatkan beberapa pihak seperti puskesmas, kepolisian, dan Limnas. Sedangkan pihak dari kecamatan Kotagede hanya terlibat saat peresmian sebagai tamu undangan. Setelah peresmian, pihak yang terlibat hanya lingkungan internal

sekolah seperti murid, bapak ibu guru yang dilibatkan. Akan tetapi, SD Negeri Baluwarti belum memiliki peraturan khusus dalam pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di sekolah.

Gambar 3.7

Simulasi Sekolah Siaga Bencana (SSB) SD Negeri Baluwarti



(Sumber: Dokumen SDN Baluwarti, 17 Desember 2019)

Pada gambar di atas merupakan rangkaian kegiatan simulasi saat peresmian (*lauching*) program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Baluwarti tahun 2016 lalu. Salah satunya yaitu pihak BPBD sedang memberikan pelatihan berupa pertolongan pertama jika ada korban yang pingsan atau terluka akibat bencana yang terjadi.

3.2.1.3 SD Negeri Bangunrejo 1

Program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Bangunrejo 1 mulai dari persiapan sampai dengan peresmian (*lauching*) di danai oleh BPBD DIY tetapi tidak dalam bentuk uang tunai melainkan dalam bentuk barang. Anggaran program Sekolah Siaga Bencana (SSB)

juga dijadikan satu antara SD Negeri Bangunrejo 1 dan SD Negeri Bangunrejo 2 sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD DIY Mahujud.S melalui wawancara yaitu;

“SD Negeri Bangunrejo 1 & 2 dalam anggaran program Sekolah Siaga Bencana (SSB) dijadikan satu karena letak kedua sekolah yang saling berhadapan dimana ketika peresmian dilakukan di SD Negeri Bangunrejo 2 dan simulasi di SD Negeri Bangunrejo 1.”

Setelah peresmian, pelaksanaan Program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Bangunrejo 1 dilakukan mandiri menggunakan dana BOS. Akan tetapi, SD Negeri Bangunrejo 1 belum mempunyai kurikulum khusus mengenai Program Sekolah Siaga Bencana (SSB) tetapi hanya dikaitkan berdasarkan buku tema pembelajaran di kelas. Selain itu, untuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pendidikan kebencanaan sudah ada. SD Negeri Bangunrejo 1 juga belum memiliki peraturan khusus dalam pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di sekolah.

Pihak yang terlibat selama persiapan sampai peresmian (*lauching*) program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Bangunrejo 1 diantaranya puskesmas, limnas, dan polisi. Sedangkan pihak dari kecamatan Tegalrejo hanya terlibat saat peresmian sebagai tamu. Akan tetapi setelah peresmian, pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) lebih aktif dilakukan melalui pembelajaran di kelas dan tidak ada simulasi kembali.

Gambar 3.8

Simulasi Sekolah Siaga Bencana (SSB) SD Negeri Bangunrejo 1

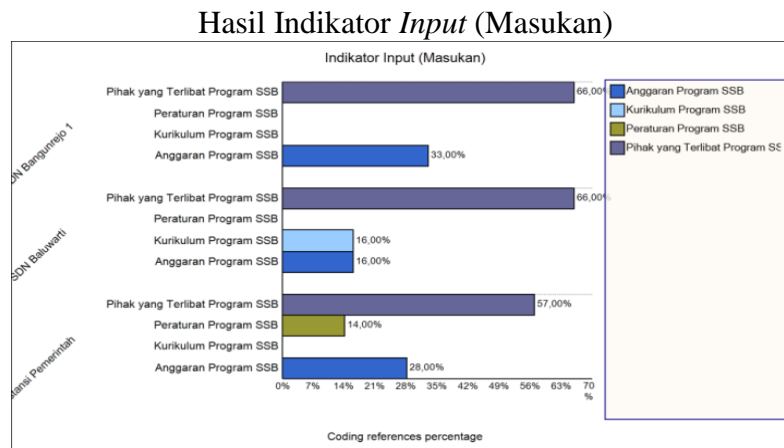


(Sumber: Dokumen SDN Bangunrejo 1, 17 Desember 2019)

Pada gambar di atas merupakan rangkaian kegiatan simulasi saat peresmian (*lauching*) program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Bangunrejo 1 tahun 2015 lalu. Salah satunya yaitu diadakan pelatihan berupa pertolongan pertama jika ada korban yang pingsan atau terluka akibat bencana yang terjadi. Terlihat pada gambar bahwa pihak kepolisian ikut terlibat dan banyaknya antusias siswa dalam mengikuti simulasi tersebut.

3.2.2 Evaluasi Indikator *Input* (Masukan)

Gambar 3.9



(Sumber: diolah dengan Nvivo 12 plus, 20 November 2019)

Tahap kedua dari evaluasi model CIPP adalah evaluasi masukan (*input*). Maksud dari evaluasi *input* adalah kegiatan evaluasi yang membantu peneliti untuk mengatur keputusan, menentukan sumber alternatif yang akan digunakan, rencana, strategi, dan prosedur kerja untuk mencapai tujuan program dimana komponen evaluasi *input* meliputi sumber daya manusia, dana anggaran, dan peraturan yang diperlukan (Darodjat & Wahyudiana, 2015). Untuk itu dalam melakukan evaluasi *input* pada program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di Kota Yogyakarta dilakukan dengan cara mengetahui apa saja yang dapat mendukung program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di Kota Yogyakarta seperti pihak yang terlibat, anggaran, peraturan dalam menjalankan program, sampai kurikulum pembelajaran yang digunakan.

Adanya kurikulum pembelajaran khusus tentang pendidikan kebencanaan akan dijadikan sebagai panduan selama proses belajar mengajar di kelas agar *edukasi* kebencanaan yang disampaikan kepada para siswa dapat dilakukan

secara sistematis dan jelas. Anggaran akan diperlukan untuk membiayai segala hal yang berhubungan dengan kegiatan dalam pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB). Untuk peraturan khusus terkait pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) akan digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan program tersebut agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari awal. Sedangkan pihak yang terlibat akan menunjukkan bagaimana keterlibatan pihak baik internal maupun eksternal dalam mendukung dan menjalankan program tersebut. Sehingga pada indikator ini akan terlihat hal-hal yang mendukung pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di sekolah dasar Kota Yogyakarta.

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa SD Negeri Baluwarti pada bagian indikator *input* (masukan) sudah memenuhi 3 (tiga) dari 4 (empat) bagian yang ada. Hal ini berarti bahwa SD Negeri Baluwarti sudah cukup baik dalam penerapan pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB). Akan tetapi, SD Negeri Baluwarti tidak memiliki peraturan khusus dalam pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di sekolah. Sedangkan untuk pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Baluwarti dulu ketika peresmian ada dari puskesmas, polisi, limnas.

Sekarang program Sekolah Siaga Bencana (SSB) sifat mandiri jadi pihak yang dilibatkan hanya internal sekolah, walaupun ada ketika simulasi besar-besaran sekitar 2-3 tahun sekali baru melibatkan pihak eksternal. Terkait anggaran, SD Negeri Baluwarti menggunakan dana BOS dalam pelaksanaan

program. Program Sekolah Siaga Bencana (SSB) juga sudah dimasukkan dalam kurikulum maupun silabus pada mata pelajaran di kelas mulai dari kelas I-VI.

Sedangkan SD Negeri Bangunrejo 1 pada bagian indikator *input* (masukan) sudah memenuhi 2 (dua) dari 4 (empat) bagian penilaian yang ada, dimana pada peraturan khusus terkait pelaksanaan program dan kurikulum terkait program belum ada. Hal ini berarti bahwa SD Negeri Bangunrejo 1 bisa dikategorikan cukup dalam penerapan pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB). Selama simulasi saat peresmian program Sekolah Siaga Bencana (SSB) tahun 2015 lalu banyak melibatkan pihak eksternal mulai dari polisi, limnas, dan puskesmas.

Akan tetapi, setelah peresmian sudah tidak ada simulasi lagi sehingga pihak eksternal tidak dilibatkan kembali. Anggaran pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Bangunrejo 1 dialokasikan dari dana BOS. Untuk peraturan dan kurikulum khusus terkait pelaksanaan program belum ada, tetapi RPP (Rencana Pelaksana Pembelajaran) sudah ada. Pendidikan kebencanaan biasanya dikaitkan berdasarkan buku tema pembelajaran di kelas. Untuk kelas I dan II dikaitkan pada tema pembelajaran mengenai lingkungan, dampak bencana banjir, dan kebakaran hutan. Kelas IV sampai VI dikaitkan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS.

Ada banyak instansi pemerintah selain BPBD DIY yang dilibatkan dalam program Sekolah Siaga Bencana (SSB) selama persiapan sampai peresmian diantaranya Dinas Dikpora Kota Yogyakarta, TNI, Polisi, LSM, NGO,

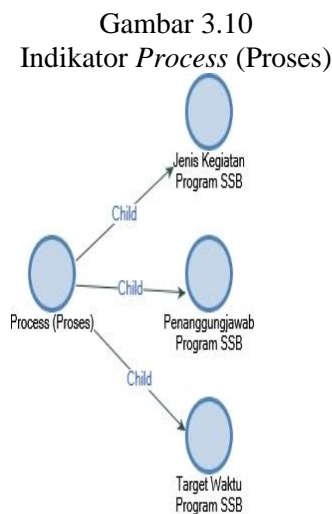
puskesmas, PMI, Dinas Kesehatan. Keterlibatan mereka disesuaikan dengan masing-masing tugasnya seperti Dinas Dikpora Kota Yogyakarta yang ditunjuk untuk membantu dalam penyusunan kurikulum pendidikan kebencanaan, TNI/Polisi terlibat dalam gladi dan simulasi kegiatan, LSM/NGO yang dilibatkan dalam penyusunan rencon, dan puskesmas/PMI/Dinas Kesehatan terlibat dalam pemberian Pelatihan *PPGD* (Pelatihan Pertama Pertolongan Gawat Darurat). mulai dari persiapan sampai peresmian (*lauching*). Terkait anggaran mulai dari persiapan sampai peresmian di danai keseluruhannya oleh BPBD DIY dalam bentuk sarana prasaran, konsumsi, transportasi, dan sebagainya. Beberapa peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) diantaranya Permendikbud No 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dan Peraturan Kepala BNPB nomor 4 tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman Bencana.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi pada indikator *input* (masukan) program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di 2 (dua) sekolah dasar SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 bisa dikatakan cukup, dilihat dari 4 (empat) bagian pembahasan yaitu pihak yang terlibat, kurikulum program, peraturan khusus terkait program, dan anggaran dalam pelaksanaan program. Akan tetapi, ada yang belum terpenuhi yaitu kurikulum dan peraturan khusus terkait program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Bangunrejo 1. Begitu pula dengan SD Negeri Baluwarti yang juga belum memiliki peraturan khusus terkait program Sekolah Siaga Bencana (SSB). Sebaiknya sekolah SD

Negeri Bangunrejo 1 segera membuat kurikulum dan peraturan khusus terkait pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB). Begitupula dengan SD Negeri Baluwarti agar membuat peraturan khusus tersebut agar lebih memudahkan pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) kedepannya.

3.3 Indikator *Process* (Proses)

Dalam indikator *Process* (Proses) pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian pemaparan yaitu jenis kegiatan program SSB, penanggungjawab program SSB, dan target waktu program SSB dari instansi pemerintah, SD Negeri Baluwarti, dan SD Negeri Bangunrejo 1 seperti gambar di bawah ini;



(Sumber: diolah dengan Nvivo 12 plus, 20 November 2019)

3.3.1 Hasil Lapangan Indikator *Process* (Proses)

Berdasarkan kegiatan wawancara lapangan dengan BPBD DIY, kepala sekolah dan guru selaku fasilitator kegiatan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 serta melalui

dokumentasi data sekunder yang ada maka dapat terkumpul data-data hasil wawancara sehingga dapat disajikan dalam tabel perbandingan sebagai berikut;

Tabel 3.5
Perbandingan Data *Process* Hasil Wawancara dan Dokumentasi

No	Sumber Data	Indikator <i>Process</i> (Proses)		
		Jenis Kegiatan Program SSB	Penanggung Jawab Program SSB	Target Waktu Program SSB
1.	Instansi Pemerintahan	ada	ada	tidak ada
2.	SD Negeri Baluwarti	ada	ada	tidak ada
3.	SD Negeri Bangunrejo 1	ada	ada	tidak ada

(Sumber: diolah peneliti, 17 Desember 2019)

Berikut adalah penjelasan dari perbandingan data proses hasil wawancara dan dokumentasi dari ketiga sumber data di atas, yaitu;

3.3.1.1 Instansi Pemerintah

BPBD DIY selaku lembaga yang menjadikan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) sebagai salah satu program pokoknya, membuat beberapa jenis kegiatan baik selama persiapan sampai menjelang peresmian program tersebut di sekolah-sekolah yang telah ditunjuk termasuk SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1. Ada beberapa jenis kegiatannya mulai dari sosialisasi sampai dengan simulasi sekaligus peresmian (*lauching*). Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD DIY Mahujud.S menjelaskan bahwa proses pembentuk sekolah berbasis Sekolah Siaga Bencana (SSB) dimulai dari sosialisasi selama

2 hari. Selanjutnya, Bimbingan Teknis (BimTek) pertama yaitu penyusun dokumen Renkon (Rencana Kondensi) dimana ketika bencana terjadi maka Renkon akan menjadi Renop (Rencana Operasi) berupa peta evakuasi, sarana prasarana yang dimiliki, dan tim siaga bencana sekolah. Terakhir akan diadakan gladi dan simulasi dari Renkon yang telah disusun yang sebelumnya dibuat skenario.

Penanggungjawab dari pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) diserahkan oleh BPBD DIY kepada kepala sekolah di masing-masing sekolah berbasis Sekolah Siaga Bencana (SSB) tersebut. Sedangkan untuk target program sendiri diharapkan bersifat *continue* (berkelanjutan), walaupun setelah peresmian (*lauching*) BPBD DIY hanya sebatas memonitoring karena selanjutnya pelaksanaan program dilakukan mandiri oleh masing-masing sekolah pelaksana program Sekolah Siaga Bencana (SSB).

3.3.1.2 SD Negeri Baluwarti

Kegiatan yang dilakukan ketika awal ditunjuknya SD Negeri Baluwarti sebagai salah satu sekolah pelaksana program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di Kota Yogyakarta yaitu sosialisasi konjengsi untuk mencari akar masalah kenapa program SSB harus ada di kawasan tersebut sampai membuat administrasi semacam Standar Operasional Prosedur (SOP). Kemudian jenis kegiatan yang rutin sesuai anjuran BPBD yaitu mengadakan simulasi kebencanaan dimana SDN Baluwarti fokus kebencanaannya lebih kepada gempa bumi.

Simulasi diadakan setahun sekali pada bulan Agustus dengan pertimbangan pada siswa baru yang harus di fokuskan atau diutamakan. Hal senada juga disampaikan oleh Anjani salah satu murid di SD Negeri Baluwarti pada 24 Oktober 2019, bahwa;

“Simulasi dilakukan pada pagi sebelum memulai pelajaran atau siang saat jam istirahat selama 1 jam. Kegiatan selama simulasi seperti meletakkan tas di kepala, berlindung dibawah meja, berkumpul di titik kumpul yang telah ditentukan, dan cara memberikan pertolongan kepada para korban. Biasanya setelah selesai simulasi, ada pentas seni tari dari siswa kelas I.”

Sebelum diresmikan SDN Baluwarti sebagai Sekolah Siaga Bencana (SSB) ada pelatihan seperti Bimtek (Bimbingan Teknis), Workshop, dan sebagainya yang terkait dengan kebencanaan untuk semua guru dan kepala sekolah. Untuk kegiatan sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 Juli 2015. Sedangkan Bimbingan Teknis Penyusunan Kurikulum dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 8 Juli 2015. Kegiatan lainnya yaitu Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi, Pelatihan PPGD, dan simulasi atau glasi sekaligus meresmikan SD Negeri Baluwarti dilakukan oleh Walikota Yogyakarta pada tahun 2016.

Pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Baluwarti terbilang masih aktif dan berlanjut mulai dari simulasi sampai pembelajaran di kelas dimana penanggungjawab program yaitu kepala sekolah langsung. Tahun 2018, Mahasiswa Universitas

Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) jurusan PGSD pernah mengadakan program yang mengajak guru-guru pelaksana Sekolah Siaga Bencana (SSB) untuk membuat buku tentang pendidikan kebencanaan yang lebih sederhana agar lebih dipahami oleh para siswa.

3.3.1.3 SD Negeri Bangunrejo 1

Pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Bangunrejo 1 dilakukan melalui beberapa jenis kegiatan seperti dulu ada simulasi kemudian sosialisasi. Sosialisasi pertama untuk guru kemudian pihak sekolah akan mengadakan pertemuan untuk sosialisasi ke murid dan wali murid. Akan tetapi untuk simulasi baru dilakukan satu kali saat peresmian (*lauching*) secara masal.

Ketika akan dikembangkan menjadi Sekolah Siaga Bencana (SSB) tahun 2014, SD Bangunrejo 1 telah melakukan beberapa kegiatan seperti sosialisasi PRB dan Bimtek kurikulum PRB terintegrasi dalam kurikulum KTSP di sekolah. Sedangkan kegiatan pada tahun 2015 meliputi menyusun rencana kontinjensi (Renkon) bencana banjir dan tanah longsor, pelatihan PPGD, gladi posko, dan gladi lapangan (simulasi) sekaligus peresmian oleh Walikota Yogyakarta.

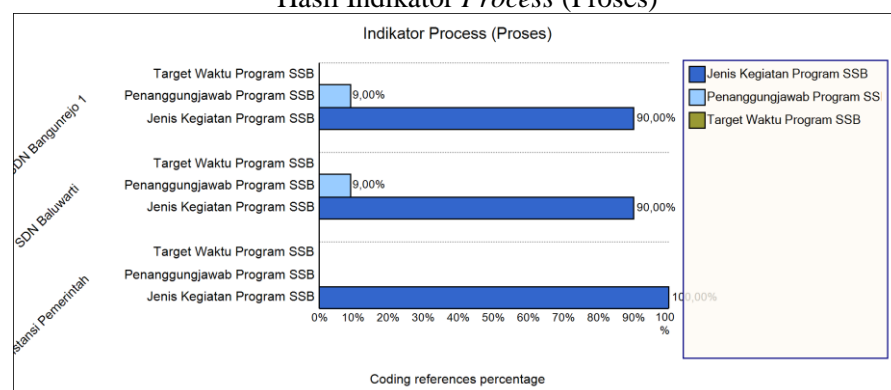
Tahun 2018, Mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) jurusan PGSD pernah mengadakan program yang mengajak guru-guru Sekolah Siaga Bencana (SSB) untuk menulis buku cerita menarik dan sederhana tentang kebencanaan agar anak-anak lebih memahami secara keseluruhan dengan baik di SDN Baluwarti

kemudian buku tersebut dicetak dan dibagikan ke sekolah-sekolah yang melaksanakan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) yang disesuaikan potensi bencananya.

Selain itu, setiap tahun sekitar bulan Agustus Dinas Lingkungan Hidup mengundang perwakilan guru-guru untuk ikut sosialisasi mengenai lingkungan seperti sekolah hijau. Penanggungjawab pelaksanaan program yaitu kepala sekolah langsung. Program SSB di SD Negeri Bangunrejo 1 masih aktif tetapi dimasukkan dalam pembelajaran di kelas yang disesuaikan dengan tema pembelajaran pemutaran video kebencanaan yang dikaitkan dengan tema pembelajaran atau dalam ekstrakurikuler pramuka juga diajarkan pertolongan pada korban bencana.

3.3.2 Evaluasi Indikator Process (Proses)

Gambar 3.11
Hasil Indikator *Process* (Proses)



(Sumber: diolah dengan Nvivo 12 plus, 20 November 2019)

Tahap ketiga dari evaluasi model CIPP adalah evaluasi *Process* (Proses).

Maksud dari evaluasi *process* yaitu untuk melihat seberapa jauh kegiatan yang

sudah terlaksana sesuai dengan rencana serta mengontrol apakah suatu program telah memberikan umpan balik (Arikunto & Jabar, 2014). Untuk itu, maka dalam melakukan evaluasi *process* pada program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di Kota Yogyakarta dilakukan dengan cara mengetahui kegiatan apa yang dilakukan dalam program, siapa orang yang bertanggung jawab, dan kapan kegiatan akan selesai agar dapat diketahui sejauh mana program Sekolah Siaga Bencana (SSB) berjalan di Kota Yogyakarta.

Jenis kegiatan akan menjelaskan apa saja kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) sesuai dengan yang direncanakan pada awal proses pembentukan program. Untuk penanggung jawab program yang juga akan berperan sebagai pemimpin dalam menjalankan setiap kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang. Salah satu fungsi dari kepemimpinan yaitu fungsi koordinasi, dimana bentuk perwujudannya untuk menggerakkan bawahannya untuk berfikir dan bertindak berupa menghubungkan, menyatupadukan, menyelaraskan hubungan antara orang-orang dan pekerjaan dalam satuan organisasi yang satu dengan lainnya sehingga diharapkan berjalan harmonis dan mampu memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi (Siagian, dalam Faturahman 2018). Sedangkan target waktu pelaksanaan program akan digunakan sebagai acuan perhitungan waktu dari awal program tersebut dibentuk sampai selesai pelaksanaan program.

Berdasarkan gambar di atas, SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 sama-sama memperoleh nilai yang sama. Jenis kegiatan pun

sama, mulai persiapan sampai peresmian dari simulasi sampai pembelajaran di kelas bahkan tahun 2018 Mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) jurusan PGSD pernah mengadakan program yang mengajak guru-guru pengajar di sekolah yang melaksanakan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) untuk menulis buku cerita menarik tentang kebencanaan. Hali ini dilakukan untuk membuat anak-anak lebih memahami secara sederhana terkait penanganan ketika terjadi bencana. Kegiatan tersebut dilakukan di SDN Baluwarti dimana buku karya tersebut dicetak dan dibagikan ke sekolah-sekolah yang melaksanakan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) dengan disesuaikan potensi bencananya.

Akan tetapi untuk simulasi kegiatan, SD Negeri Bangunrejo 1 tidak se-aktif SD Negeri Baluwarti yang melakukannya setahun sekali. Penanggungjawab pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 dipegang langsung oleh kepala sekolah selaku penanggungjawab program. BPBD DIY sendiri menjelaskan proses pembentuk program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 yang diawali dari sosialisasi selama 2 hari dimana dikumpulkan guru-guru, komite, dan masyarakat sekitar untuk mengikuti sosialisasi tentang kerentanan yang ada di sekolah termasuk apa saja yang perlu disiapkan.

Selanjutnya, Bimbingan Teknis (BimTek) pertama yaitu penyusun Renkon (Rencana Kondensi) yang mensinergikan 3 unsur (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dengan guru dan komite dimana sasaran utama orang tua karena anak-anak merupakan kelompok rentan bencana. Penyusun Renkon bertujuan

untuk melatih guru dan masyarakat sekitar untuk bisa membuat rencana dalam menghadapi bencana dimana hasilnya berupa dokumen yang memaparkan siapa saja yang terlibat, apa yang harus dilakukan, sarana prasarana, dimana, dan bagaimana caranya menghadapi bencana.

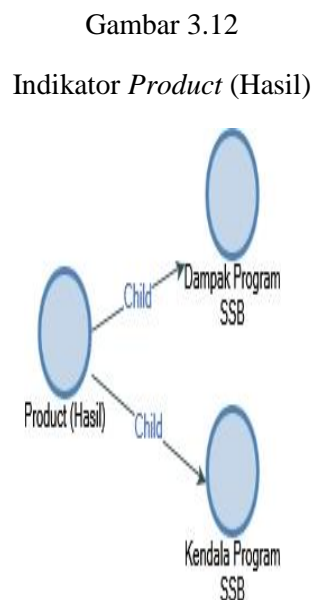
Ketika bencana terjadi maka Renkon akan menjadi Renop (Rencana Operasi) sehingga tidak kebingungan dalam menghadapi bencana maupun tumpang tindih tanggungjawab dan juga mengkaji resiko yang ada serta bagaimana menekan resiko, kendala, serta sumber daya yang dimiliki. Hasilnya bisa berupa peta evakuasi, sarana prasarana yang dimiliki, dan tim siaga bencana sekolah. Ada indeks penyusunan kurikulum yang mengintegrasikan materi-materi penanggulangan resiko bencana, hasilnya yaitu RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) atau Silabus yang memuat pengarusutamaan bencana sehingga bisa timbul budaya siaga bencana. Renkon yang telah disusun sebelumnya dibuat scenario kemudian terakhir akan diadakan gladi dan simulasi. Skenario simulasi perlu dilakukan berulang-ulang, sampai kemudian di diresmikan (*launching*) menjadi Sekolah Siaga Bencana (SSB).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi pada indikator *input* (masukan) program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di 2 (dua) sekolah dasar SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 bisa dikatakan sudah baik jika dilihat dari 3 (tiga) bagian pembahasan yaitu target waktu pelaksanaan, penanggungjawab pelaksanaan program, dan jenis kegiatan. SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 sama-sama sudah memenuhi 2 (dua) bagian pembahasan yaitu penanggungjawab pelaksanaan program dan jenis

kegiatan. Akan tetapi target waktu pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB), SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 belum terpenuhi karena memang BPBD DIY menginginkan program tersebut bersifat *continue* (berkelanjutan) dengan dilakukan mandiri oleh masing-masing sekolah sehingga tidak memiliki target waktu kapan akan selesai atau diberhentikan. Mengingat program ini sangat memberikan umpan balik positif bagi pengetahuan siswa terutama tentang kesiapsiagaan bencana.

3.4 Indikator *Product* (Hasil)

Dalam indikator *Product* (Hasil) pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian pemaparan yaitu dampak pelaksanaan program SSB dan kendala pelaksanaan program SSB dari instansi pemerintah, SD Negeri Baluwarti, dan SD Negeri Bangunrejo 1 seperti gambar di bawah ini;



(Sumber: diolah dengan Nvivo 12 plus, 20 November 2019)

3.4.1 Hasil Data Lapangan Indikator Product (Hasil)

Berdasarkan kegiatan wawancara lapangan dengan kepala sekolah, guru selaku fasilitator kegiatan program Sekolah Siaga Bencana (SSB), para siswa, serta masyarakat sekitar di SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 serta melalui dokumentasi data sekunder yang ada maka dapat terkumpul data-data hasil wawancara sehingga dapat disajikan dalam tabel perbandingan sebagai berikut;

Tabel 3.6
Perbandingan Data *Product* Hasil Wawancara dan Dokumentasi

No	Sumber Data	Indikator <i>Product</i> (Hasil)	
		Dampak Program SSB	Kendala Program SSB
1.	Instansi Pemerintahan	ada	ada
2.	SD Negeri Baluwarti	ada	ada
3.	SD Negeri Bangunrejo 1	ada	ada

(Sumber: diolah peneliti, 17 Desember 2019)

Berikut adalah penjelasan dari perbandingan data konteks hasil wawancara dan dokumentasi dari ketiga sumber data di atas, yaitu;

3.4.1.1 Instansi Pemerintah

Terlaksananya program Sekolah Siaga Bencana (SSB) dengan baik terutama di Kota Yogyakarta khususnya SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 tentu menjadi harapan BPBD DIY dan instansi

pemerintah lainnya yang terlibat. BPBD DIY selaku lembaga yang menangani langsung program tersebut, merasakan dampak yang begitu positif pada sasaran program yaitu masyarakat sekitar dan warga lingkungan sekolah. Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD DIY Mahujud.S dalam wawancaranya menyampaikan bahwa;

“Seiring dengan sering terjadinya bencana alam menjadikan pola pikir masyarakat terhadap bencana makin meningkat terutama tentang budaya siaga bencana termasuk animo dari pihak sekolah, orang tua, dan murid meningkat melalui adanya program SSB.”

Sedangkan untuk kendala dalam pelaksanaan program sendiri umumnya yaitu masalah kesadaran masyarakat akan bencana yang masih rendah. Selain itu, kendala internal terkait terbatasnya sumber daya manusia dimana di Yogyakarta saja menurut kajian resiko bencana ada 296 sekolah yang berada di kawasan bencana tetapi kemampuan sumber daya manusia terbatas sehingga yang dikerjakan juga terbatas. Pihak pemerintah kurang dalam mendukung program BPBD.

3.4.1.2 SD Negeri Baluwarti

SD Negeri Baluwarti menilai tujuan dari program Sekolah Siaga Bencana (SSB) mampu terwujud dengan baik. Hal ini dikarenakan penilaian dari lingkungan sekolah terbilang positif mulai dari para siswa yang menjadi sasaran utama program, guru dan kepala sekolah, bahkan sampai warga sekitar sekolah. Endah Kurniawati selaku salah satu guru pendamping dalam pelaksanaan program Sekolah Siaga

Bencana (SSB) menilai bahwa pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SDN Baluwarti terbilang efektif untuk para siswa sebagai langkah antisipasi jika terjadi bencana sesungguhnya seperti paham untuk tidak panik, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari, dan tau kemana harus berlindung.

Hal yang sama disampaikan oleh Fardan murid kelas VI dalam wawancara pada 24 Oktober 2019, yaitu;

“Kami senang mengikuti kegiatan simulasi karena diajarkan bagaimana cara menghadapi situasi jika terjadi bencana seperti meletakkan tas di kepala, berlindung dibawah meja, berkumpul di titik kumpul yang telah ditentukan, dan cara memberikan pertolongan kepada para korban.”

Selain itu, orang tua para siswa dan warga sekitar walaupun tidak terlibat langsung dalam simulasi rutin ini, tapi mereka tetap merasakan dampaknya dimana anak-anaknya mendapatkan pendidikan kebencanaan tidak hanya sebatas pembelajaran di kelas. Kendala yang dihadapi oleh SD Negeri Baluwarti dalam pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) diantaranya terkait anggaran karena adanya perubahan-perubahan Petunjuk Teknis (juknis) dana BOS akan berdampak pada laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan SSB, kekhawatiran akan kesiapan metal ketika nanti terjadi bencana yang sesungguhnya, serta padatnya kegiatan sekolah menjadi kendala dalam pelaksanaan program SSB

3.4.1.3 SD Negeri Bangunrejo 1

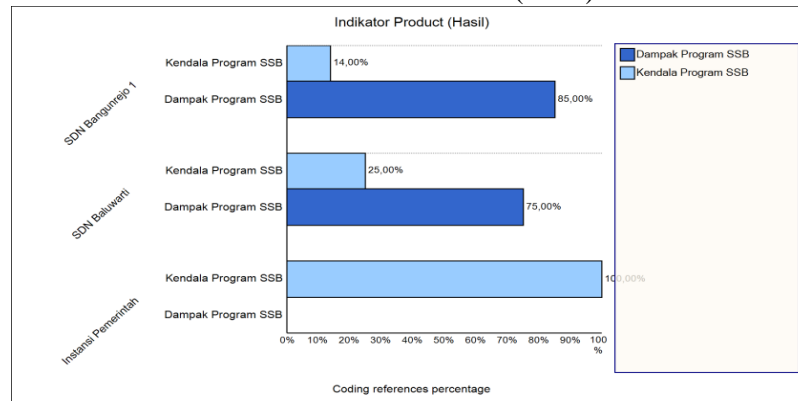
Pelaksanaan program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri Bangunrejo 1 walaupun tidak ada simulasi rutin tiap tahun tetapi aktif dalam pembelajaran di kelas, sehingga tetap memberikan dampak positif bagi pengetahuan mengenai pendidikan kebencanaan khususnya bagi para murid seperti yang disampaikan oleh Syifa dan Kayla dalam wawancara pada 04 November 2019, bahwa;

“Adanya beberapa mata pelajaran yang dihubungkan dengan pendidikan kebencanaan seperti IPA, IPS, dan Olahraga dan pemutaran video terkait kebencanaan cukup menambah pengetahuan kami tentang kebencanaan terutama cara menghadapinya walaupun terkadang saat pembelajaran membosankan.”

Sedangkan, orang tua para siswa dan warga sekitar walaupun tidak terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar ini, tetapi mereka tetap merasakan dampaknya dimana anak-anaknya mendapatkan pendidikan kebencanaan yang cukup baik. Untuk kendala dalam melaksanakan program ini yaitu keterbatasan waktu dimana SDN Bangunrejo 1 harus berbagi tempat dengan SDN Bangunrejo 2 yang masih dalam tahap renovasi sehingga setiap mata pembelajaran dikurangi waktunya 10 menit.

3.4.2 Evaluasi Indikator *Product* (Hasil)

Gambar 3.13
Hasil Indikator *Product* (Hasil)



(Sumber: diolah dengan Nvivo 12 plus, 20 November 2019)

Tahap keempat dari evaluasi model CIPP adalah evaluasi *Product* (Hasil). Maksud dari evaluasi *product* adalah kegiatan berupa penilaian yang dilakukan guna mengukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan program yang telah direncanakan sebelumnya. Hasil evaluasi akan sangat menentukan apakah program masih harus diteruskan, diperbaiki, atau bahkan dihentikan (Darodjat & Wahyudiana, 2015). Untuk itu, evaluasi hasil yang akan diperoleh dari program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di Kota Yogyakarta adalah menilai keberhasilan program dalam meraih pencapaian yang telah dirancang dengan melihat dampak dan kendala yang terjadi sebagai bukti adanya proses berjalannya program sampai pada menghasilkan sebuah kebijakan baru apakah program ini perlu ditingkatkan dengan cara baru agar lebih efektif.

Berdasarkan gambar di atas, dampak yang dirasakan oleh warga lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar sekolah terhadap adanya pelaksanaan program Sekolah Siaga Siaga Bencana (SSB) di SD Negeri

Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 berada pada nilai di atas 70% yang berarti memuaskan. Hal ini menandakan bahwa program Sekolah Siaga Siaga Bencana (SSB) di 2 (dua) sekolah dinilai efektif dalam rangka meningkatkan pendidikan kebencanaan warga lingkungan sekolah SD Negeri Baluwarti maupun SD Negeri Bangunrejo 1. Walaupun ada beberapa kendala yang harus diperbaiki oleh SD Negeri Baluwarti, SD Negeri Bangunrejo 1, dan BPBD DIY.

SD Negeri Baluwarti memiliki beberapa kendala seperti perubahan Petunjuk Teknis (juknis) anggaran dana BOS yang akan berdampak pada laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan SSB, kekhawatiran akan kesiapan mental para siswa ketika nanti terjadi bencana yang sesungguhnya, serta padatnya kegiatan sekolah yang menyulitkan para guru mencari waktu untuk melaksanakan program. Sedangkan, kendala yang dihadapi oleh SD Negeri Bangunrejo 1 lebih kepada keterbatasan waktu dimana SD Negeri Bangunrejo 1 harus berbagi tempat dengan SD Negeri Bangunrejo 2 yang masih dalam tahap renovasi sehingga setiap mata pembelajaran dikurangi waktunya 10 menit. Sedangkan BPBD DIY kendalanya lebih kepada kurang koordinasinya dengan pemerintah, terbatasnya sumber daya manusia, dan masalah kesadaran masyarakat akan bencana yang masih rendah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi pada indikator *product* (hasil) program Sekolah Siaga Bencana (SSB) di 2 (dua) sekolah dasar SD Negeri Baluwarti dan SD Negeri Bangunrejo 1 dari segi dampak

yang ditimbulkan bisa dikatakan sangat baik dan berhasil sesuai tujuan program. Hal ini dikarenakan dampak yang di dapat oleh sasaran program seperti para murid, orang tua, dan warga sekitar lingkungan sekolah sangat positif. Mereka merasa bahwa pendidikan kebencanaan melalui program Sekolah Siaga Bencana (SSB) mampu meningkatkan sikap siaga para murid dalam menghadapi bencana terutama untuk anak-anak yang terkenal rentan menjadi korban jika bencana alam terjadi. Akan tetapi dari segi kendala juga banyak hal yang harus diperbaiki dimana kendala yang dirasakan oleh SD Negeri Bangunrejo 1 dan SD Negeri Baluwarti secara keseluruhan yaitu anggaran dan keterbatasan waktu dalam melaksanakan program Sekolah Siaga Bencana (SSB).